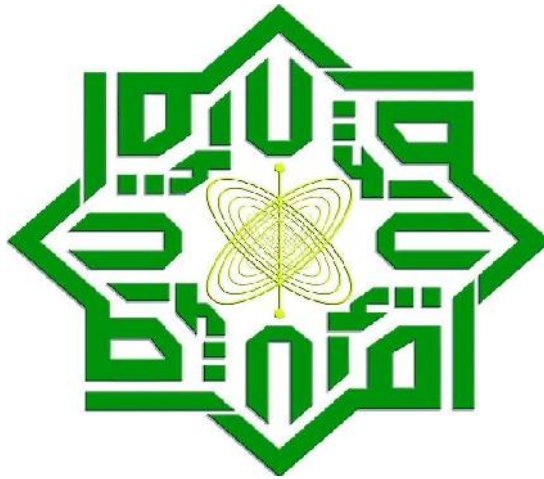


**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
DAN PENERAPAN *RAHN* (GADAI SYARIAH) PADA PERUM
PEGADAIAN SYARIAH CABANG HR. SOEBRANTAS
PANAM PEKANBARU**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE. Sy)**



**G I A R T O
NIM. 10825002664**

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2012 M/1433 H

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah karena hasil observasi penulis mendapatkan adanya perbedaan tarif ijarah dengan pinjaman yang sama dan barang jaminan yang sama. Penelitian ini berlokasi di Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas yang beralamt di Jalan HR. Soebrantas Km. 10,5 Panam Pekanbaru.

Permasalahan dalam penelitian pelaksanaan *Rahn* (gadai syariah) serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan *Rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Rahn* (gadai syariah) yang di jalankan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru, serta apakah pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (gadai syariah) sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pimpinan cabang dan pegawai yang langsung terlibat dalam proses *Rahn* (gadai Syariah) yang berjumlah 8 orang, setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode Deskriptif analitik serta metode penulisan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yang mana pelaksanaan *Rahn* (gadai Syariah) adalah sebagai berikut: akad yang digunakan adalah akad *rahn*, sedangkan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadaian menggunakan akad *ijarah* ditentukan berdasarkan besarnya taksiran, dan ditambah dengan membayar uang administrasi yang ditentukan dari jumlah pinjaman, uang pinjaman yang diberikan 90% dari jumlah taksiran, dan jangka waktu pinjaman pinjaman selama 4 bulan, apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak mampu untuk melunasi maka *marhun* akan dijual untuk membayar pokok pinjaman di tambah *ijarah* dan biaya penjualan, apabila hasil penjualan melebihi dari pinjaman maka menjadi milik *rahin*, akan tetapi

kalau hasil penjualan lebih kecil dari pinjaman nasabah diwajibkan membayar kekurangan tersebut.

Dari pelaksanaan *Rahn* (gadai Syariah) tersebut peneliti menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* EMAS.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | viis |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar belakang masalah..... | 1 |
| B. Batasan masalah..... | 9 |
| C. Perumusan masalah..... | 10 |
| D. Tujuan dan kegunaan penelitian | 10 |
| E. Metode penelitian dan sistematika penulisan..... | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |

BAB II GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG

HR.SOEBRANTAS PEKANBARU

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Pegadaian..... | 16 |
| B. Sejarah Pegadaian Syariah | 17 |
| C. Sejarah berdirinya Perum Pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru | 20 |
| D. Aspek Legal Pendirian Pegadaian Syariah | 21 |
| E. Visi dan Misi..... | 28 |
| F. Struktur organisasi | 30 |
| G. Produk –produk perusahaan,..... | 40 |

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG RAHN (GADAI SYARIAH)

| | |
|--|----|
| A. Pengertian dan dasar hukum <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)..... | 44 |
| B. Rukun dan syarat <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) | 52 |
| C. Hak dan kewajiban para pihak Gadai Syariah..... | 56 |
| D. Pemanfaatan Marhun (barang gadai) | 58 |
| E. Resiko kerusakan Marhun | 59 |
| F. Gadai dalam Islam..... | 60 |

BAB IV : PENERAPAN RAHN (GADAI SYARIAH) PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG HR. SOEBRANTAS

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan dan Penarapan <i>Rahn</i> (gadai Syariah)pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru..... | 63 |
| B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan <i>Rahn</i> (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru | 80 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 88 |
| B. Saran | 89 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------|--|----|
| II.I | TABEL STRUKTUR ORGANISASI..... | 36 |
| IV.I | TABEL TARIF IJARAH..... | 65 |
| IV.II | PERBADAAN TARIF IJARAH..... | 66 |
| IV.III | TABEL DISCOUNT JASA SIMPANAN..... | 69 |
| IV.IV | TABEL PENGGOLONGAN PINJAMAN DAN BIAYA ADMINISTRASI..... | 71 |
| IV.V | MARHUN..... | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, yang tidak hanya diterima bagi umat Islam saja akan tetapi dapat juga diterima oleh kalangan non Muslim. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai mana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya di dalam Al-Qur'an:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah di tunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”(QS Al-Jum’ah: 10)

Akan tetapi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh sebahagian manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dilain pihak, ada juga sebahagian manusia yang dengan penghasilannya tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhannya, kalau sudah demikian mau tidak mau manusia harus mengurangi berbagai keperluan yang tidak dianggap penting. Namun keperluan yang sangat

penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari sumber yang ada.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga apabila mengalami kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga kebutuhan yang mendesak tersebut dapat terpenuhi, namun risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk dikembalikan, kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

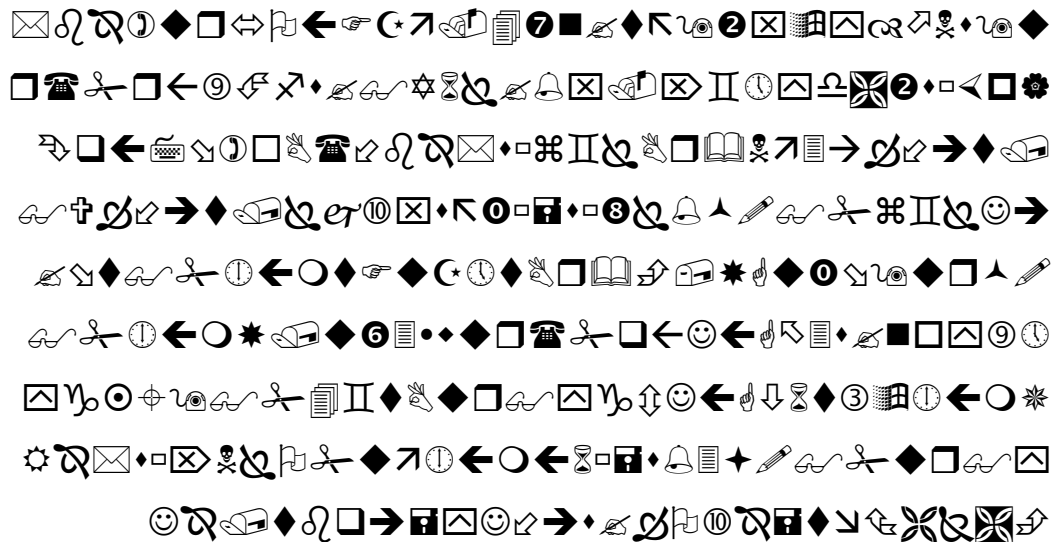
Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya pada lembaga tertentu yang disebut dengan istilah gadai. Dan di Indonesia salah satu lembaga resmi yang menjalankan usahanya dalam bentuk gadai adalah Perum Pegadaian Syariah.

Istilah *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis.¹Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak penyelenggara Gadai Syariah.²Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 128.

² Mustafa Edwin Nasution dan DKK, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 314.

atau sebagian utang dapat diterima.³Hukum gadai boleh sama seperti jual beli,⁴ sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an:



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah:283)

Ayat di atas menjelaskan bahwamembolehkan gadai pada waktu bepergian(musafir) dan berada di tempat domisilinya, hal ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW,saat melakukan gadai dengan orang Yahudi di kota Madinah,yang terdapat di dalam Hadist Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Ahmad,Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu majah dari Anas R.A, ia berkata:

³ Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 106.

⁴ Abdurrahman Al jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001) h. 257.

رَهَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ الْإِهْلِهِ

“*Rasulullah Saw, merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau berhutang gandum dari seorang Yahudi.*”⁵

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non-Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

Rahn atau gadai dilihat dari sisi Fiqih disebut *Ar-Rahn* yaitu suatu Akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang.⁶ Sedangkan menurut Syara’ Gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.⁷ Sedangkan Wirdianingsih berpendapat tentang *rahn* yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan suatu barang yang relative nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁸

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan

⁵Hendi Suhendi, *op.cit*, h.107.

⁶ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Instination Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.1339.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekanisa Edisi 2, 2004), h.156.

⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h.135.

oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*.⁹

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal. 245.

- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHNEMAS* beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan Prinsip *rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

Oleh karena besarnya permintaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terhadap jasa pegadaian yang sesuai dengan Syariah, lembaga keuangan Syariah melirik kepada sektor ini, diantaranya Pegadaian yang membuka cabang Pegadaian Syariah. Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa

¹⁰ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h.418.

operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Pegadaian Syariah berdiri pertama kali di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah(ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun Januari 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversikan menjadi Pegadaian Syariah. Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi Modern, yaitu asas rasional, efisiensi dan efektifitas yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah dan Unit Layanan Gadai Syariah(ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha Gadai Konvensional.¹¹

Selanjutnya, Kanwil Perum Pegadaian Pekanbaru membuka cabang Syariah baru yaitu Perum Pegadaian Syariah cabang Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008 dan selanjutnya di pindahkan ke jalan HR.Soebrantas pada tanggal 2 Januari 2011, dimana disambut antusias oleh masyarakat di daerah

¹¹Buchari AlmaDoni Jumi Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. AlFabet, 2009), h.30.

Panam khususnya yang dibuktikan dengan bertambahnya nasabah dari tahun ke tahun, disamping prestasi tersebut, pegadaian jugamempunyai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, diantaranya atas tanggapan masyarakat bahwa Pegadaian Syariah sama saja dengan Pegadaian Konvensional dalam operasionalnya, yang berbeda hanya istilah yang dipakai. Sebagai contoh: Biaya penyimpanan dan perawatan barang gadaian, dalam Pegadaian Syariah dikenal dengan istilah *Ijarah*, sedangkan pada Pegadaian konvensional dikenal dengan istilah biaya sewa (bunga). Serta kendala yang lain yang dihadapi pegadaian syariah adalah kurangnya sumber daya Insani dari pegadaian Syariah yang menguasai tentang ekonomi Islam, dikarenakan para pegawai Pegadaian Syariah juga merupakan pegawai dari Pegadaian Konvensional yang di Mutasi ke Pegadaian Syariah tanpa memperhatikan Basic dari pegawai tersebut terhadap pemahaman tentang Ekonomi Syariah.¹² Sehingga ada pegawai yang terkadang tidak dapat menjawab segala pertanyaan nasabah yang berkaitan dengan *rahn*.

Selain itu, dalam penentuan tarif *ijarah* ada yang masih terdapat ketidakjelasan, sebagai Ilustrasi ada seorang nasabah yang ingin mengulang gadai pada waktu jatuh tempo yaitu 4 bulan, karena nasabah tersebut belum bisa melunasi pinjaman maka nasabah tersebut diperbolehkan mengulang gadai dengan syarat membayar *Ijarah* (biaya sewa) selama 4 bulan terdahulu ditambah biaya administrasi untuk akad yang baru, akan tetapi setelah dilakukannya akad gadai yang baru terjadi perbedaan tarif *ijarah* antara gadai yang terdahulu dengan gadai

¹² Sigit prayogi A.Md, pegawai Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas, wawancara, Tanggal 03 April 2011.

yang baru dengan pinjaman yang sama, sehingga menjadi pertanyaan yang belum terjawab mengapa tarif tersebut bisa berbeda.

Masalah lain dalam hal barang yang bisa dijadikan *marhun*, karena didalam Brosur tertulis barang yang dapat dijaminkan antara lain emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua bisa diterima oleh Pegadaian Syariah sebagai jaminan, itu terjadi ketika nasabah membawa barang selain emas dan perhiasan pihak Pegadaian menolaknya, dengan kondisi ini image negatif akan timbul dari masyarakat bahwa Pegadaian tidak jujur dan terus terang tentang barang yang dapat dijadikan jaminan, hal tersebut jelas tidak sesuai dari brosur yang dibuat oleh pihak pegadaian.

Dari latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian yang intensif terhadap pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup penelitian ini, penulis merasa perlu untuk membuat batasan masalah yang akan diteliti. Sebab dengan adanya batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulis dalam pembahasan. Di samping itu agar tidak menyimpang dari permasalahan dan mengena sasaran yang diharapkan,

makapembahasan dalam penelitian ini dibatasitentangTinjauanEkonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan*Rahn*(Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

C. Rumusan Permasalahan

Dari latarbelakang yang telahdikemukakan, maka yang menjadipermasalahanpenelitianiniadalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Penerapan*Rahn*(Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (Gadai Syariah) yang dijalankan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. TujuanPenelitian

- a. Untukmengetahuibagaimana pelaksanaan dan penerapan*Rahn* (Gadai Syariah) yang dijalankan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan*Rahn*(Gadai Syariah) yang dijalankan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

2. KegunaanPenelitian

- a. Sebagai sumbangan atas sebuah pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnyadalambidangilmuekonomi Islam yang sekaligusikutdalammelengkapibahanrujukan yang berhubungan dengan Ekonomi Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran serta masukan kepada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.
- c. Sebagai karya tulis dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian/lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi penelitian di Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas Km.10,5 Panam Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ditempat tersebut karena penulis telah melakukan observasi dan menemukan adanya masalah yang perlu untuk diteliti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Cabang dan Karyawan Perum Pegadaian Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, sedangkan Objek penelitian ini adalah pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pimpinan cabang Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dan pegawai bagian pelayanan gadai yang berjumlah 8 orang. Di karenakan terlalu sedikitnya populasi maka peneliti mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.
- b. Data skunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, serta literatur literatur yang mendukung penelitian. Seperti buku-buku bacaan, brosur Pegadaian, koran, majalah.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu metode yang digunakan peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap lokasi yang dijadikan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab langsung kepada narasumber guna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

- c. Dokumen-dokumen. Yaitu: Surat Edaran tentang Rahn, Ijarah, dan bonus.

6. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian ini dengan bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu berusaha menggambarkan kenyataan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan didukung oleh sejumlah data yang menghubungkan pada teori-teori yang berhubungan dengan itu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang rasional.

7. Metode Penulisan

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode *Induktif*, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang khusus.
- b. Metode *Deduktif*, yaitu menggambarkan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dianalisa kemudian di ambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode *Deskriptif*, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis sesuatu menurut keadaan fakta-fakta yang ada karakteristik populasi tersebut, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara faktual dan cermat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran umum Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, yang terdiri dari sejarah Pegadaian, sejarah Pegadaian Syariah, sejarah berdirinya Pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, aspek-aspek pendirian pegadaian syariah, visi dan Misi, struktur organisasi perusahaan, produk –produk Pegadaian syariah.

BAB III: Tinjauan umum tentang gadai, pengertian *rahn* dan dasar hukum *rahn* (gadai syariah), rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban Gadai Syariah, pemanfaatan *marhun* (barang jaminan), resiko kerusakan *marhun*, gadai dalam Islam.

BAB IV: Penerapan dan Pelaksanaan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, serta Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (Gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG

HR. SOEBRANTAS PANAM PEKANBARU

A. Sejarah Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan di kembangkan oleh belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke-19.

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenag-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di

tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatsblad (Stbl) 1901 N0. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanannya Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.¹

B. Sejarah Pegadaian Syariah

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat

¹Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2011) h. 80

Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Berdirinya Pegadaian Syariah ini didasarkan atas perjanjian Musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam perjanjian ini Bank Muamalat Indonesia memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah, sedangkan Perum

Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.²

Ketentuan nisbah yang di sepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamalat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian, perjanjian kerjasama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002, dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank syariah selain mem-Back-up dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.³

Karena Bank Muamalat Indonesia sendiri masih belum punya manajemen skill dalam bidang ahli menaksir barang, adapun [pegadaian](#) sudah mempunyai ahli penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara [pegadaian](#) dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:

- a) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²Buchari Alma Doni Jumi Priansa, *loc.cit*

³Adrian Sutedi, *op.cit.*, h.86

- b) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
- c) Mencegah dan memberantas praktek pegadaian gelap, ijon.⁴

Dari tugas, tujuan dan fungsi pegadaian tersebut perum pegadaian adalah lembaga kredit yang melayani hampir semua jenis kebutuhan dana. Kredit tersebut dapat berupa kredit untuk kebutuhan konsumsi atau terlebih untuk tujuan produksi (misalnya biaya pengolahan sawah dan sebagainya).

C. Sejarah berdirinya Pegadaian syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru

Cabang Pegadain Syariah HR. Sobrantas pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan di Jalan HR. Soebrantas KM 10,5 Panam yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II, Perum Pegadaian Pekanbaru No. 302/ OP 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

Berdasarkan keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Panam Pekanbaru menimbang dan menyatakan bahwa:

⁴*Ibid*, h. 91

- 1) Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
- 2) Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor Wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang pegadaian Syariah di jalan HR. Soebrantas Km. 10,5 Panam Pekanbaru Provinsi Riau.
- 3) Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.

D. Aspek-Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Dalam mewujudkan sebuah Pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian, adapun aspek-espek pendirian Pegadaian Syariah tersebut antara lain:

1. Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah, namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat (1) a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk

menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kemudian misi dari Perum Pegadaian yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2) b, yaitu mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya., pasal tersebut dapat dijalankan sebagai legitimasi bagi berdirinya Pegadaian Syariah. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero). Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang di operasikan sesuai dengan prinsip syariah, aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian, permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*Musyarakah*) atau dengan mencari sumber dana (*Shahibul Mal*), dengan perusahaan gadai sebagai pengelola dan perusahaan lain sebagai penyedia dana (*Mudharabah*).

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan Pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya, SDM Pegadaian Syariah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual beli, serta mampu menangani masalah-masalah yang di hadapi nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syariat Islam dimana Pegadaian itu berada.

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup utang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadaian apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat.

Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai. Penaksir gadaian adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu mereka perlu dididik, dilatih, digembleng pengetahuan dan keterampilannya.

Diperlukan waktu yang cukup untuk melatih mereka. Selain penaksir barang, pada perusahaan gadai syariah diperlukan juga analis kelayakan usaha yang andal untuk menilai usaha yang diajukan pada perjanjian utang piutang gadai dalam bentuk *mudharabah*. Analisis kelayakan usaha yang andal adalah tumpuan harapan bagi perusahaan gadai syariah untuk memperoleh bagi hasil yang memadai. Untuk juru taksir, pada tahap awal barangkali perlu dipekerjakan kembali pada pensiunan penaksir perum pegadaian, kemudian untuk para analisis kelayakan usaha diperlukan tenaga – tenaga sarjana yang berpengalaman minimal 2 tahun. Calon–calon manajer pun perlu dipersiapkan untuk pimpinan pusat maupun cabang.

4. Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syari'ah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemashalatan masyarakat.

Perusahaan gadai syariah membawa misi syi'ar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariah islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur – unsur riba.

Usaha – usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syari'ah adalah usaha – usaha yang tidak dilarang dalam agama islam. Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat.

5. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh

karena itu, gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

Menyandang nama syariah pada kegiatan utang piutang gadai membawa konsekuensi harus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh karena itu, sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian utang piutang yang dalam bentuk *al-qardhul hassan* maupun utang piutang gadai dalam bentuk *almudharabah*.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian utang piutang gadai dalam bentuk *al-qardhul hassan* dan yang ingin memasuki perjanjian utang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah*, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki perjanjian utang piutang gadai dalam bentuk *al-mudharabah* adalah peminjam dalam jumlah besar.

6. Aspek pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena dalam pengertian pengawasan itu termasuk di dalamnya pengawasan oleh yang maha kuasa melalui malaikat-nya. Oleh karena itu, organ pengawasan internal perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan amanah.

Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapat mempertanggung jawabkannya dihadapannya Allah SWT dihari akhir kelak. Termasuk dalam organ pengawasan adalah Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari para ulama yang cukup dikenal masyarakat.

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.⁵

E. Visi dan Misi Pegadaian

Adapun Visi Pegadaian adalah sebagai berikut:
PADA TAHUN 2013 PEGADAIAN MENJADI "CHAMPION" DALAM PEMBIAYAAN MIKRO DAN KECIL BERBASIS GADAI DAN FIDUCIA BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH.

Sedangkan Misi Pegadaian syariah adalah:

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.

⁵*Ibid*, h. 86-91

2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.⁶

Perjalanan Misi Perusahaan Perum Pegadaian :Misi Perum Pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan Menteri Keuangan No. Kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada : Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif Kaum buruh / pegawai negeri yang ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
3. Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari Perjan menjadi Perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan

⁶<http://www.pegadaian.co.id/visi-dan-misi-pt-pegadaian-persero>. Php.

itu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalah misi perusahaan Perum Pegadaian yaitu “ ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.⁷

Bertolak dari misi Pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

F. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa “ Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

⁷*Ibid*

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi Perum Pegadaian adalah bentuk line dan staff dengan tata kerja sebagai berikut:

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasional –nya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staf direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta Inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari Perum Pegadaian yang berada di bawah binaan Divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional, yang terdiri dari ahli dibidang fiqih

muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh dewan syariah nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Fungsi dewan pengawas syariah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi unit usaha syariah dan Pimpinan kantor cabangsyariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
- 2) Sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk pengembangan unit usaha syariah yang diawasinya.
- 3) Sebagai Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha Bagian Gudang Penaksiran Kasir Keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional- MUI.

Sedangkan fungsi Direksi atara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan, baik usaha inti maupun usaha non inti.

2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi General Manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan Gadai Syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

Fungsi Pimpinan Wilayah dalam pembinaan Unit Layanan Gadai Syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang Gadai Syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi Manager Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah:

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian Unit Layanan Gadai Syariah hingga sampai pembuatan laporan Keuangan Unit Layanan Gadai Syariah konsolidasi seIndonesia.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional Unit Layanan Gadai Syariah.
3. Membuat kebijaksanaan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan Cabang Unit Layanan Gadai Syariah.

Fungsi Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris Manajer Kantor Cabang Unit Layanan Gadai Syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada Direksi. Sedangkan Direksi akan membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh Jendral manager usaha lain dan manajer unit layanan gadai syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad *rahn*(gadai syariah), *ijarah* (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.
- 2 Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit layanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah pegawai dengan masing-masing bagian sebagai berikut:
 - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
 - b. Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.

- c. Bagian gudang bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun* selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan *marhun*.⁸

Adapun karyawan Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru terdiri dari:

1. Mas'ud : Sebagai Pimpinan Cabang
2. Yuria : Sebagai Penaksir
3. Rika Gusni Yendri : Pembantu ADM
4. Ilham : Office Boy
5. Hermanto : Sebagai Penjaga keamanan

Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas memiliki 5 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada di bawah pimpinan cabang tersebut yaitu:

- 1) UPS Sidomulyo
- 2) UPS Kubang Raya
- 3) UPS Tanah Merah
- 4) UPS Paus Ujung
- 5) UPS Pasar Cik Puan.⁹

⁸Adrian Sutaedi, *op.cit*, h. 92-95

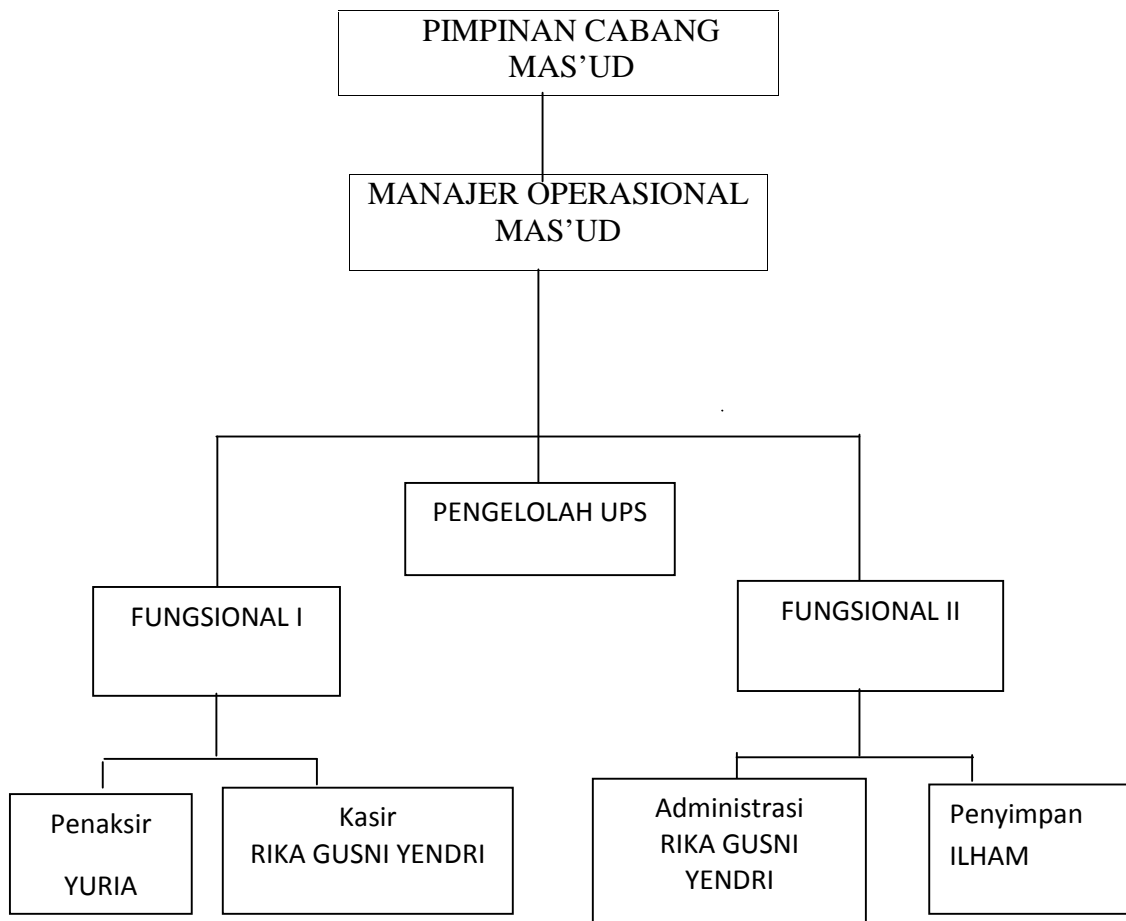
⁹Yulhairat, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah HR. Soebrantas*. Wawancara, tanggal 1 Juli 2012

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Perum Pegadaian Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini:

TABEL II.I

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN SYARIAH

CABANG HR. SOEBRANTAS KM. 10,5 PANAM PEKANBARU



Sumber: Dokumen Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas KM. 10,5 Panam Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b) Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional *rahn*, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminanan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
- d) Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan
- e) Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Manajer Operasional

Manajer operasional mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *Rahn*

- b) Merancang, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha *Rahn*
 - c) Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit
 - d) Menangani jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu)
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
 - f) Membina bawahan dalam rangka pembinaan pegawai.

3. Fungsional I dan II

Adapun tugas fungsional adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman
- b) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang
- c) Merencanakan dan menginginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

- e) Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f) Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

4. Pengelola UPS

Adapun tugas-tugas pengelola UPS adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS.
- b) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo.
- c) Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS.
- e) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya serta menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- f) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.¹⁰

¹⁰Dokumen Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru

G. Produk-Produk Pegadaian Syariah

Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru mempunyai 3 produk yang utama yaitu:

1) *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah: skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan system gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Persyaratan pinjaman *Rahn*:

- Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
- Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- Menandatangani akad.

Keuntungan gadai di Pegadaian Syariah:

1. Produktif

meningkatkan daya guna suatu barang berharga anda dan asset andapun produktif serta tetap menjadi milik anda.

2. Praktis

prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.

3. Optimal

Barang jaminan di taksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset andapun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.

4. Fleksibel

Jangka waktu pinjaman fleksibel, anda bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.

5. Menentramkan

Di kelola secara syariah, barang anda aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

2) *Arrum* (*Ar-rahn* untuk usaha Mikro kecil)

Arrum adalah skim pinjaman dengan system syariah bagi para pengusaha Mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan system pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Persyaratan pinjaman *Arrum* adalah:

- Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.

- Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan satu tahun.
- Survey dan analisa kelayakan usaha.
- Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- Menandatangani akad *Arrum*.

Keuntungan *Arrum* :

- ✓ Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis anda.
- ✓ Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat anda gunakan untuk factor produksi.
- ✓ Prosedur dan syarat yang mudah, serta waktu dari survey sampai pencairan cepat.
- ✓ Biaya Ijarah yang relative ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- ✓ Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

3) Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Mulia memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran.

Keuntungan investasi logam mulia:

- Pembelian emas dengan cara tunai atau angsuran.
- Investasi emas melalui perusahaan resmi berpengalaman dan terpercaya.
- Bersertifikat resmi dari PT. Antam Tbk.

- Tariff kompetitif dan prosesnya sederhana.
- Tren harga emas selalu naik.
- Dapat di beli dengan cara mengangsur sampai 3 tahun.
- Mudah di uangkan lagi dengan cara di jual atau di gadaikan.
- Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 1 kg.
- Bila nasabah menginginkan, pegadaian menyediakan jasa penyimpanan logam mulia di tempat yang aman.

Persyaratan memiliki logam mulia:

- Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya.
- Mengisi formulir aplikasi mulia.
- Menyerahkan uang muka.
- Menandatangani akad mulia.
- Akad mulia menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*.¹¹

¹¹ Brosur pegadaian Syariah

BAB III

TELAAH PUSTAKA

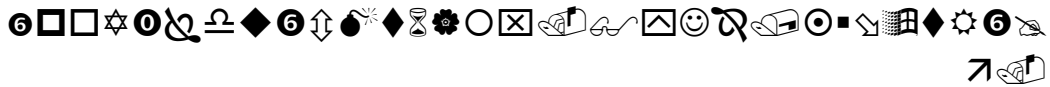
A. Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn* (gadai syariah)

Ar-Rahn merupakan masdar dari *rahana-yarhanu-rahnan* yang secara bahasa artinya adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (tetap dan langgeng), juga berarti *al-habs* yang berarti penahanan, dalam Fiqih Muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *Ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-Rahn* atau gadai menurut bahasa berarti *Al-tsubut* dan *Al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu juga *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Jadi menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹

Gadai dalam bahasa arab di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*, secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lestari berarti penahanan, menurut bahasa *rahn* juga berarti pemenjaraan, misalnya perkataan mereka (orang Arab) *Rahanasy syai-a* artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap, dan memiliki pengertian tetap dan kontinyu, ada berpendapat kata *rahn* bermakna tertahan, dengan dasar Firman Allah SWT:

¹ Hendi Suhendi, *loc. Cit*, h. 106

(QS.Almuddatstsir:38)



“ *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Pada ayat tersebut kata *Rahinah* bermakna tertahan pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya. Menurut Ibnu Faris menyatakan Huruf *ra'* dan *ha'* serta *nun* adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak, dan dari kata ini terbentuk kata *Ar-Rahn* yaitu sesuatu yang digadaikan.

Sedangkan menurut zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminanbenda ini dapat diambil kembali setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dapat dibayar maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual dan hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berhutang.²

Menurut istilah Syara' *Ar-Rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang.

²A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari,*Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet.1, h.21

2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan utang piutang.
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
4. Sedangkan dalam Fiqih Sunnah menurut bahasa *ar-Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* adalah penahanan, seperti dikatakan *Ni'Matun Rahinah* yang artinya karunia yang tetap dan lestari.³ Sedangkan menurut Syara' apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.

Ar-Rahn dalam hukum Islam dilakukan dalam sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan, sedangkan dalam hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).⁴

³ Hendi Suhandi, op. cit. h.105

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) h.15.

Pengertian *rahn* secara bahasa seperti diungkapkan diatas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵

Rahn (Gadai Syariah) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *Rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas utang/pinjaman atau *marhun-bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.

Lebih lanjut Ali mengungkapkan pengertian gadai syariah yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi*, (Ekonosia, 2004), h.156

1. Ulama Syafi'iah mendefenisikan sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya.

2. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

3. Ulama Malikiyyah mendefenisikan sebagai berikut:

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutmawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

4. Ahmad azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun-bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Rahn (Gadai Syariah) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun-bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak

yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.⁶

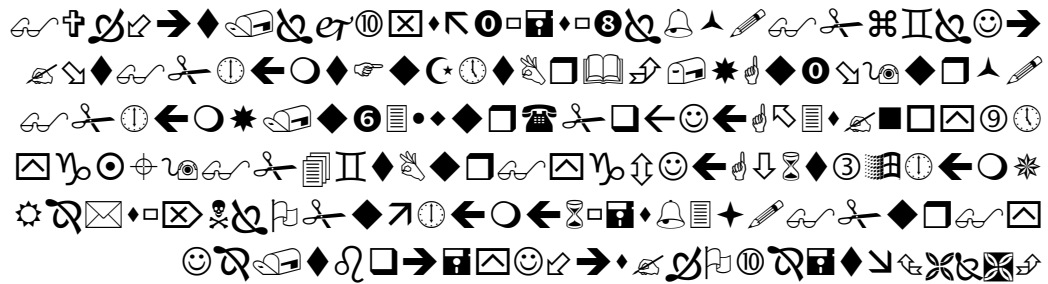
Jika memperhatikan pengertian *rahn* di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang di pinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku Fiqih Muamalah akad ini merupakan akad *Tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

Adapun definisi *rahn* dalam hukum syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu mengembalikannya, atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang. Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berhutang tidak mampu melunasinya.

Sebagai referensi atau landasan hukum pinjam meminjam dengan menggadaikan barang terdapat dalam Firman Allah SWT, sebagai berikut:



27. Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001) h. 128



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah:283)

Ayat di atas menjelaskan bahwa membolehkan gadai pada waktu bepergian (musafir) dan berada di tempat domisilinya, hal ini pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, saat melakukan gadai dengan orang Yahudi di kota Madinah. dan di dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasa’i, dan Ibnu majah dari Anas R.A ia berkata:

رَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٍّ بِلَمَدَيْنَةٍ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرَ الْإِهْلَةِ

“Rasulullah Saw, merungguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau berhutang gandum dari seorang Yahudi”.⁷

⁷Hendi Suhendi, *op.cit*, h.107.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang Muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non Muslim.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

1. Penjualan *marhun*

- a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁸

Sedangkan berdasarkan Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHNEMAS* beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan Prinsip *Rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

B. Rukun dan Syarat *rahn* (gadai syariah)

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun antara lain:

1. Akad *Ijab* dan *Qabul*, seperti seorang berkata:” Aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10,000,00” dan yang satu lagi menjawab,” aku terima gadai mejamu seharga Rp.10,000,00” atau bisa pula dilakukan dengan selain kata-kata seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
2. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*), adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *Tasharuf*, yaitu

⁸Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta:P3EI Prees,2008)h.418

mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan tentang gadai.

3. Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang di jadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus di bayar.
4. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁹

Dalam menjalankan gadai Syariah, pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Adapun rukun gadai syariah tersebut antara lain:

- 1) *Ar-Rahin* (orang yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal dan bisa di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

- 3) *Al-Marhun* (barang yang di gadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

- 4) *Al-Marhun-bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

- 5) *Shighat, ijab* dan *Qabul*.

⁹Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.108

Kesepakatan antararahin dan murtahindalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

- 1) Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*.
- 2) Akad *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan atas jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Orangnya telah dewasa.
- 2) Berfikir sehat.
- 3) Barang yang di gadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai.
- 4) Barang gadaian dapat di serahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang di jadikan jaminan itu dapat berupa emas, berlian dan benda

bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah).¹⁰

Sedangkan para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *Ar-rahn* sesuai dengan rukun *Ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *Ar-rahn* meliputi:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Syarat *shigat* (lafal)
- c. Syarat *marhun -bih* (utang) adalah: merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang, dan utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu serta utang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqih adalah: (1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) agunan itu milik sah orang yang berhutang, (5) barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain, (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan (7) barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

C. Hak dan Kewajiban Gadai Syariah

¹⁰ Adrian Sutedi, *op.cit*, h.28

1) Hak pemegang gadai

- Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun-bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Selama *marhun-bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

2) Kewajiban pemegang gadai

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu di atas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

a) Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah

1. Hak pemberi gadai

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun-bih*.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun-bih*, dan biaya lainnya.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

2. Kewajiban pemberi gadai.

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun-bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun-bih* kepada *murtahin*.¹¹

D. Pemanfaatan *Marhun* (barang jaminan)

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:

(لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَنَمُهُ)

.....pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve) cet.4, h. 383

(HR Asy-Syafii dan Ad-Daruqutnhi).

Jumhur ulama Fiqih, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi utangnya.¹²

selanjutnya *murtahin* juga tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

(كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah yang termasuk riba”(HR Harits bin Abi Usamah).¹³

E. Resiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang di bawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya gudang tidak dikunci, lalu barang-

¹²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 256

¹³Hendi Suhendi, *Loc.cit* h.108

barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagai mana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*.¹⁴

F. Gadai dalam Islam

1) Status barang gadai

Ulama Fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*).

Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu dikuasai oleh *murtahin* maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak, karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.¹⁵

2) Jenis barang gadaian

barang gadaian yang dapat dijadikan jaminan sebagai pengikat utang, yang dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Barang-barang yang dapat dijual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah

¹⁴Ibid

¹⁵Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Madia Pratama, 2007), cet. II, h. 255

dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir.

- b) Barang gadaian harus merupakan harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing serta babi.
- c) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan (tidak dapat dipastikan ada tidaknya).
- d) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

3) Pemeliharaan barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.¹⁶

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya

¹⁶Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), hal. 56.

sebagai pemilik yang sah, namun apabila *marhun* menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.¹⁷

¹⁷Ibid, h. 82-83

BAB IV

PENERAPAN RAHN (GADAI SYARIAH) PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG HR. SOEBRANTAS

A. Pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru

Setelah penulis mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di lapangan tempat penelitian di lakukan yaitu di Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru selanjutnya data-data yang penulis peroleh tersebut dianalisa dan kemudian disusun menjadi sebuah hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, dapat penulis jelaskan di bawah ini.

1) Akad yang digunakan

a. Akad Rahn

Pada Akad *Rahn* nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di Kantor Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* alias biaya perawatan dan perniagaan terhadap *marhun*.

b. Akad Ijarah

Akad *ljarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian komponsasi, yaitu pemilik yang menyewakan manfaat disebut *muajjir* sedangkan penyewa atau nasabah disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ujran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*.¹

Dalam akad *ijarah*, para pihak membuat dan menandatangani akad dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan *ijarah* sebesar *ijarah* sebesar *ijarah* per sepuluh hari.
- b) Jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* kepada *mua'jjir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
- c) Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal di luar kemampuan *mua'jjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian, atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun-bihijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi,

¹ Buku panduan operasional Rahn pada Perum Pegadaian Syariah

sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi.²

Penentuan *ijarah* ditentukan dengan menggunakan tarif yang berbeda pada setiap jenis barang yang digadaikan, berikut ini tarif *ijarah* yang diberlakukan di Pegadaian Syariah.

Tabel IV.I

Tarif Ijarah³

| NO | Jenis <i>Marhun</i> | Perhitungan Tarif |
|----|---------------------|--|
| 1 | Emas, Berlian | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 85 x jangka waktu/10 |
| 2 | Elektronik | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 90 x jangka waktu/10 |
| 3 | Kendaraan bermotor | Taksiran/Rp 10.000 x Rp 95 x jangka waktu/10 |

Adapun rumus perhitungan tarif *ijarah* adalah:

$$\text{Tarif Ijarah} = N \times T \times W$$

Keterangan:

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang di tentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif

W = Lama waktu pinjaman di bulatkan kelipatan 10.

Akan tetapi dalam prakteknya penentuan tarif *ijarah* ada yang menimbulkan pertanyaan karena adanya perbedaan jumlah *ijarah* yang ditetapkan dengan

² Surat Bukti rahn (SBR)

³ Surat Edaran tentang penentuan tarif Ijarah

jumlah pinjaman yang sama dan barang jaminan yang sama pula, dan ini sering terjadi ketika nasabah ingin mengulang gadai.⁴ Sebagaimana dalam kasus dibawah ini: pada tanggal 23 juli 2012 saudara Giarto menggadaikan satu gelang rantai emas 18 karat seberat 2,35 gram dengan nomor SBR00332 dengan pinjaman Rp.800.000; dengan *ijarah* persepuluh hari Rp.6100;. dan pada tanggal 26 September 2012 saudara Giarto melakukan gadai ulang dengan nomor SBR00506 dengan pinjaman tetap Rp.800.000; dengan tarif *ijarah* persepuluh hari Rp.6200;⁵dijelaskan pada tabel di bawah ini:

TABEL IV.II
PERBEDAAN TARIF IJARAH

| No SBR | Tanggal Akad | Taksian | Jumlah pinjaman | Ijarah/10 hari | Biaya administrasi |
|---------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| BK 00332 | 23/07/2012 | Rp 846.000; | Rp 800.000; | Rp.6100; | Rp.8000; |
| BK 00506 | 26/09/2012 | Rp 872.438; | Rp 800.000; | Rp.6200; | Rp.8000; |

Dok.Surat Bukti Rahn

Dari tabel di atas diketahui adanya perbedaan tarif *ijarah* antara gadai yang pertama dengan gadai yang kedua dengan pinjaman yang sama, setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pimpinan Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, adapun terjadinya perbedaan tarif *ijarah* tersebut disebabkan perbedaan nilai taksiran barang jaminan antara akad gadai yang lama dengan akad gadai yang baru. Pada gadai pertama nilai taksiran *marhun* Rp.846.000; dan pada gadai yang kedua harga emas naik maka naik pula harga taksiran *marhun* sebesar Rp.872.438;. Seperti diketahui bahwa harga emas bisa

⁴ Observasi pada Perum Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru tanggal 14 April 2012

⁵ SBR nomor 00332 tanggal 23 Juli 2012 dan nomor 00506 tanggal 26 September 2012

berubah setiap saat, jadi apabila harga emas naik maka harga taksiran terhadap *marhun* akan naik pula dan ini berpengaruh terhadap naiknya tarif *ijarah*, karena penentuan tarif *ijarah* ditentukan dari besarnya jumlah taksiran *marhun*, begitu juga sebaliknya apabila harga emas turun di pasaran maka harga taksiran terhadap *marhun* juga akan mengalami penurunan sehingga berpengaruh pula terhadap penentuan tarif *ijarah*.⁶ Dan terhadap barang jaminan berupa barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor pihak Perum Pegadaian Syariah menerapkan sistem cicil atau bayar sebahagian minimal 20% apabila pinjaman nasabah telah jatuh tempo, ini dilakukan untuk menjaga resiko kerugian sebab barang elektronik dan kendaraan bermotor semakin lama akan semakin turun harganya.

Untuk itu kepada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru seharusnya menaikkan jumlah pinjaman kepada *rahin* atas naiknya taksiran *marhun* walaupun kenaikan jumlah pinjaman yang ditawarkan sedikit, dengan begitu *rahin* tidak merasa keberatan jika pihak Pegadaian Syariah menaikkan *ijarah* pada akad gadai yang kedua. Setidaknya dengan dinaikkannya jumlah pinjaman tersebut bisa membantu *rahin* untuk menutupi biaya administrasi pada akad gadai yang kedua dan tidak menghapus kecurigaan *rahin* terhadap Pegadaian Syariah yang hanya menetapkan *ijarah* dengan berat sebelah. Sehingga dengan demikian *rahin* tidak akan merasa keberatan lagi dan tidak akan ada lagi protes dan kecurigaan *rahin* terhadap Pegadaian Syariah, mudah-mudahan dengan kejelasan tersebut akan menarik simpati umat Islam untuk selalu

⁶ Yulhairat, pimpinan Perum Pegadaian syariah HR. Soebrantas, wawancara, tanggal 2 Juli 2012

bertransaksi gadai pada Perum Pegadaian Syariah.

2) Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun-bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun-bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun-bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun-bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar.

Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai "balas jasa" kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad. Berikut ini peneliti tampilkan tabel diskon.

Tabel IV.III

Tabel Besaran Diskon Jasa Simpan⁷

| Besaran MB | Diskon | Tarif setelah diskon (Rp) |
|------------|--------|---------------------------|
|------------|--------|---------------------------|

⁷ Surat Edaran tentang pemberian Diskon pada Perum Pegadaian Syariah

| | (x tarif) | Kantong | Elektronik | Kendaraan |
|---------------------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| >80 x taks. | 0 | 90 | 95 | 100 |
| 70% - 79% x taks | 10 | 81 | 86 | 90 |
| 60% - 69 x taks | 20 | 72 | 76 | 80 |
| 50% - 59% x taks | 30 | 63 | 67 | 70 |
| 40% - 49% x taks | 40 | 54 | 57 | 60 |
| 30 ⁰ /o- 39 % x taks | 50 | 45 | 48 | 50 |
| 20 ¹ /o- 29 % x taks | 60 | 36 | 38 | 40 |
| 10 ⁰ /o-19 % x taks | 70 | 27 | 29 | 30 |
| <10% x taks | 80 | 18 | 19 | 20 |

3) Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *Rahn*(Gadai Syariah)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan *Rahn* (gadai syariah)pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas adalah sebagai berikut:

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, Dan lain-lain)
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti:
 - Perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya
 - Barang-barang elektronik
 - Kendaraan Bermotor
4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi, Surat Kuasa bermeterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan
5. Menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).⁸

⁸ Brosur Rahn pada Perum Pegadaian Syariah

4) Pemberian pinjaman, Penentuan Uang Pinjaman(*marhun bih*) dan Biaya Administrasi

Prosedur pemberian pinjaman (*marhun-hih*) pada Pegadaian syariah HR. Soebrantas Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas serta barang jaminan ke loket
3. Petugas Pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan, Besarnya pinjaman/*marhun-bih* adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun* serta membayar uang administrasi.

Tabel IV.IV

Penggolongan Pinjaman dan Biaya Administrasi⁹

| Golongan <i>Marhun</i> | Plafon <i>Marhun Bih</i> (Rp) | | | Biaya Adm |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|-----------|------------------|
| A | | s/d | 500,000 | 5,000 |
| B | 501,000 | | 1,000,000 | 8,000 |

⁹ Surat Edaran tentang biaya Administrasi pada Perum Pegadaian

| | | | | |
|---|------------|--|-------------|--------|
| C | 1,005,000 | | 5,000,000 | 16,000 |
| D | 5,010,000 | | 10,000,000 | 25,000 |
| E | 10,050,000 | | 20,000,000 | 40,000 |
| F | 20,100,000 | | 50,000,000 | 50,000 |
| G | 50,100,000 | | 200,000,000 | 60,000 |

4. Apabila telah disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

5) Batas Waktu Pinjaman

Praktek gadai yang ada di Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dalam menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman adalah selama 4 bulan dan dapat di perpanjang lagi selama mampu dan mau membayar jasa biaya administrasi dan simpanan, atau perbaharui akad gadai, sedang penererapan tarif *ijarah* yang dilaksanakan pegadaian syariah pada saat ini dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang 10 hari, maka tetap di hitung 10 hari.

Namun yang harus menjadi perhatian dalam Pegadaian Syariah adalah mempersamakan antara waktu yang berbeda, yaitu antara waktu 1 hari sama dengan waktu 10 hari, ini akan memberatkan nasabah sehingga mau tidak mau nasabah harus dan terpaksa membayar pinjamangenap 10 hari walaupun nasabah tersebut membayar pinjaman belum sampai 10 hari. Secara tersirat adanya unsur riba disini yaitu tambahan yang didapat secara zhalim yaitu perbedaan waktu 10 hari.

Alangkah lebih baiknya Perum Pegadaian Syariah merubah cara penentuan pengembalian pinjaman tersebut agar tidak mengakibatkan riba dengan alternatif yang penulis suguhkan dibawah ini:

1. Batas waktu biaya simpanan tetap 4 bulan (misal yang harus dibayar Rp. 400.000;), namun apabila sebelum 4 bulan sudah mampu mengembalikan, maka Pegadaian Syariah dapat mengambil suatu kebijakan menjadikan sisa pembayaran 1 bulan Rp.100.000; sebagai bonus bagi nasabah. Jadi yang harus dibayarkan nasabah Rp.300.000; saja.
2. Batas waktu biaya simpanan tetap 4 bulan, (misal yang harus dibayar Rp. 400.000;), namun perhitungan pembayarannya adalah harian, maka apabila perhitungannya harian, berarti 1 hari biaya pembayarannya Rp.3.333;, maka apabila sebelum 4 bulan sudah mampu mengembalikan *marhun-bihnnya*, maka nasabah hanya membayar Rp.3.333; x 90 (3 bulan) sekitar Rp. 300.000; saja. Apalagi saat ini era teknologi, dimana dengan sistem komputerisasi, maka perhitungan batas waktu pengembalian dan besarnya tarif *ijarah* ini apabila digunakan dalam hitungan harian bukan merupakan hal yang sulit, sehingga penerapan Pegadaian Syariah benar-benar sesuai dengan syariat Islam.

6) Barang yang dijadikan jaminan

Adapun barang- barang yang dapat dijadikan jaminan adalah: emas dan perhiasan, barang-barang elektronik (laptop, Hp, dan barang elektronik lainnya), alat- alat rumah tangga, kendaraan bermotor (sepeda Motor dan Mobil).¹⁰

Di bawah ini barang-barang yang dijadikan jaminan yang terdapat pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

TABEL IV.V
MARHUN PERIODE 31 MEI 2012¹¹

| Marhun | Kode | Jumlah |
|---------------|----------------------|---------------|
| Emas | BK (Barang kantong) | 95 |
| Berlian | BK (Barang kantong) | 2 |
| Intan | BK (Barang kantong) | - |
| Handpone | BR (Barang Rak) | 3 |
| Laptop | BR(Barang Rak) | 6 |
| Sepeda Motor | BG (Barang Gudang) | 2 |

Akan tetapi pada waktu observasi peneliti menemukan ada nasabah membawa Handpone (HP) untuk dijadikan jaminan guna memperoleh pinjaman, akan tetapi pihak Perum Pegadaian menolaknya, padahal Handpone termasuk barang elektronik yang dapat dijadikan jaminan.¹² Ada juga nasabah yang membawa emas, tetapi setelah ditaksir pihak Perum Pegadaian Syariah juga

¹⁰ Brosur Perum Pegadaian Syariah

¹¹ Dokumen Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Bulan Mei 2012

¹² Observasi, Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, tanggal 22 April 2011

menolaknyanya. Adapun hasil wawancara dari Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru adalah:

- Khusus untuk emas, kadar emas kuning harus di atas 70%, dan apabila kadarnya di bawah 70% maka tidak akan diterima untuk dijadikan barang jaminan, apabila kadar emas tersebut dibawah 70% tetapi ada tambahan berlian atau intan pada emas tersebut pihak pegadaian Syariah masih dapat menerimanya dengan syarat adanya faktur pembelian.
- Untuk emas putih pihak pegadaian Syariah bisa menerimanya sebagai jaminan apabila di sertai dengan faktur pembelian, ini di lakukan guna mencegah resiko kerugian sebab emas putih hampir sama bentuknya dengan perak atau perunggu.
- Khusus berlian dan intan, barang berharga ini sangat susah untuk di taksir sehingga perlu pihak Perum Pegadaian Syariah akan menerima dengan disertai surat bukti pembelian serta sertifikat dari berlian tersebut, dan apabila tidak adanya bukti pembelian maka tidak akan diterima sebagai jaminan guna mencegah kerugian apabila ternyata berlian dan intan tersebut palsu. Dilihat dari culing, warna, kekuatan berlian untuk melihat kualitas berlian guna untuk mengetahui harga taksiran
- Alat-alat rumah tangga (TV, kulkas, dll) pihak Perum Pegadaian Syariah sampai saat ini tidak menerima barang-barang tersebut sebagai jaminan karena sulitnya menentukan taksiran barang tersebut serta tidak adanya gudang penyimpanan.

- Barang-barang Elektronik, yang diterima oleh Perum pegadaian syariah adalah Handpone dan laptop, dengan syarat barang tersebut keluaran baru dan penggunaannya di bawah 1 tahun, dan masih original, khusus untuk Handpone yang bisa dijadikan jaminan yaitu Merk Nokia, BlackBerry, Sony, Samsung. Sedangkan laptop semua merk dengan ketentuan harus diatas Core i3 dan RAM/DDR diatas 2 GB. Spesifikasi di dalam dan luar laptop tersebut harus sama, serta dilengkapi dengan faktur pembelian dan kotak atau pembungkus serta barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak adanya cacat atau rusak. Harus ada surat pernyataan bahwa barang tersebut milik sendiri.
- Kendaraan bermotor, pihak Perum Pegadaian Syariah hanya bisa menerima sepeda motor yang pemakaiannya maksimal 5 tahun dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, kendaraan tersebut milik pribadi dengan membuat surat pernyataan bahwa barang tersebut milik pribadi.
- Mobil, pada saat ini pegadaian Syariah Hr. Soebrantas Pekanbaru belum dapat menerima sebagai jaminan karena tidak adanya gudang penyimpanan.¹³

Apabila kondisi ini dibiarkan maka image negatif masyarakat tersebut akan berlanjut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran dan keterbukaan Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas akan terus menurun, sehingga akan berakibat berpindahnya nasabah ke Pegadaian Konvensional. Karena itu, langkah lebih baik apabila brosur yang sudah ada diadakan

¹³ Yuria, penaksir Pegadaian Syariah Cabang Hr. Soebrantas, wawancara, tanggal 02 Juli 2012

perubahan guna meminimalisir adanya tanggapan negatif masyarakat , Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas perlu memikirkan cara untuk memberikan informasi yang sejelas-jelaskan kepada masyarakat tentang barang yang dapat dijadikan jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

7) Prosedur Pelunasan *Marhun-Bih* (Pinjaman) dan Penjualan *Marhun* (barang jaminan)

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi utangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat akad kembali, yaitu dengan cara:¹⁴

1. Ulang *Rahn* (U R)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat akad baru (seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi). Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat

¹⁴Buku panduan tentang operasional Rahn pada Perum Pegadaian Syariah.

Bukti *Rahn* diberi tanda UR yang artinya Ulang *Rahn*.

2. Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada Slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

3. Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang *rahn* lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4. Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan

bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila pada waktu jatuh tempo *rahin* tidak mampu melunasi pinjaman maka *marhun* akan dijual/dilelang, sebelum dilakukan penjualan *rahin* terlebih dahulu akan diberi peringatan melalui telepon dan surat pemberitahuan selambat-lambatnya 5 hari sebelum tanggal penjualan, dengan cara mengirimkan surat ke alamat *rahin*, menghubungi melalui telepon, papan pengumuman di kantor cabang, serta terakhir di kantor kelurahan/kecamatan.

Selanjutnya apabila surat peringatan itu tidak ditindak lanjutin oleh *rahin* maka pihak pegadaian syariah menjual *marhun* tersebut. Dalam pelaksanaannya pelelangan barang menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena disatu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun disisi lain pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional, dimana pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Adapun penjualan *marhun* yang dilakukan oleh pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru dengan cara apabila yang ingin dijual itu berupa emas, dan barang berharga lainnya maka akan dijual ke toko langganan yang telah dipercaya oleh pihak pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru, sedangkan kalau barang elektronik dan kendaraan bermotor akan

ditawarkan kepada orang-orang yang ingin membeli barang tersebut, sesuai dengan harga pasaran pada saat penjualan barang jaminan tersebut, akan tetapi pihak Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru akan menawarkan harga kepada pembeli di atas pinjaman *rahin* dengan tujuan agar *rahin* tidak merasa dirugikan, setelah dilakukan penjualan *marhun-bih* maka pihak Pegadaian Syariah menghubungi kembali *rahin* untuk mengkonfirmasi tentang hasil penjualan *marhun* tersebut, apabila hasil penjualan *marhun* lebih kecil dari *marhun-bih* maka *rahin* diwajibkan menutupi kekurangan tersebut, tetapi apabila hasil penjualan *marhun* tersebut lebih besar dari jumlah *marhun-bih* maka akan di pulangkan kepada *rahin* setelah di potong pinjaman dan *ijarah* serta biaya lelang.¹⁵

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.

Setelah penulis memperoleh data, lalu penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (gadai syariah) yang di terapkan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam

¹⁵Yuria, Pegawai Pegadaian Syariah, wawancara, tanggal 02 Juli 2012

Pekanbaru sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Dari kriteria sebagaimana peneliti utarakan diatas maka peneliti membandingkan penerapan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahndan* fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Biaya Penyimpanan *Marhun*

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafilah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai menjadi tanggungan dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat, kepada penggadai hanya dibebankan pembelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.¹⁶

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah, namun apabila *marhun* menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* di izinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat

¹⁶Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003), h. 3. hal. 56.

memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi hutang *rahin* kepada *murtahin*.¹⁷

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berhutang. Sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:

(لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُنْمُهُ)

....pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.

(HR Asy-Syafii dan Ad-Daruqutnhi).

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberikan ketentuan mengenai biaya pemeliharaan marhun yang terdapat dalam ayat 3 dan 4 yaitu:

- a) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- b) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

¹⁷Ibid, h. 82-83

Serta dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* EMAS Majelis Ulama Indonesia memberi ketentuan tentang biaya pemeliharaan *marhun* sebagai berikut:

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
2. Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Pada praktek di Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru *rahin* mempercayakan barang yang dijaminkan kepada Perum Pegadaian Syariah dengan ketentuan yaitu *rahin* dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) dengan membayar biaya pemeliharaan yaitu dengan membayar *ijarah* (sewa tempat dan biaya pemeliharaan) serta membayar uang administrasi pada awal akad *rahn*. Besarnya biaya penyimpanan dan perawatan *marhun* yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Syariah menggunakan tarif *ijarah* yang mana tarif tersebut ditentukan berdasarkan pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, seperti untuk perawatan barang, keamanan dan asuransi barang yang di gadai tersebut. Sehingga tarif yang ditentukan perum Pegadaian Syariah telah sesuai karena ditentukan berdasarkan biaya-biaya yang nyata-nyata diperlukan serta ongkos pemeliharaan tersebut tidak memberatkan *rahin* dan juga tidak merugikan pihak Pegadaian Syariah. Melihat dari praktek dilapangan terhadap penentuan biaya pemeliharaan *marhun* telah sesuai dengan syariat Islam.

2. Pemanfaatan dan Penjualan/ Pelelangan *Marhun*

Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun- bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Selama *marhun-bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban pemegang gadai adalah:

- Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu di atas kelalaiannya.
- Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

Jumhur ulama Fiqih, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang

yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi utangnya.¹⁸

selanjutnya *murtahin* juga tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW:

(قَرْضٌ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا)

“Setiap utang yang menarik manfaat adalah yang termasuk riba”
(HR Harits bin Abi Usamah).¹⁹

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 memberi ketentuan bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*.

Didalam prakteknya *marhun* yang dititipkan *rahin* kepada Pegadaian syariah tidak akan diambil manfaatnya, akan tetapi disimpan dengan baik pada tempat penyimpanan, tempat penyimpanan dibuat tahan api serta dilengkapi dengan CCTV serta alarm, dengan begitu *marhun-bih* akan dijamin keamanannya, dan apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan Pegadaian Syariah sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak/tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti

¹⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 256

¹⁹Hendi Suhendi, *Loc.cit* h.108

rugi sesuai ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian Syariah. Atas pembayaran ganti rugi ini *rahin* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun-bih+ijarah* sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan *ijarah* dihitung sampai dengan tanggal penebusan/ganti rugi, dengan demikian praktek yang dijalankan Pegadaian Syariah dalam hal tidak adanya mengambil manfaat dari *marhun* telah sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan dalam penjualan *marhun* apabila pada waktu jatuh tempo *rahin* tidak bisa membayar hutangnya dan biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun-bih* kepada *murtahin*.²⁰

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* memberi ketentuan dalam hal penjualan *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve) cet.4, h. 383

- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²¹

Dalam prakteknya pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru, apabila pinjaman telah jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah akan melakukan pemberitahuan ataupun peringatan, pemberitahuan dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan, dengan cara mengirimkan surat ke alamat *rahin*, menghubungi melalui telepon, papan pengumuman di kantor cabang, serta terakhir di kantor kelurahan/kecamatan. dan apabila *rahin* tidak mampu juga untuk melunasi pinjaman, maka pihak Perum pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru akan menjual *marhun* atas jaminan pinjaman yang telah jatuh tempo yang tidak dapat ditebus oleh *rahin*. Dan hasil penjualan *marhun* tersebut digunakan untuk melunasi uang pinjaman beserta jasa simpanan dan perawatan *marhun*, setelah penjualan *marhun* selanjutnya pihak Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas melakukan pencatatan hasil penjualan atau transaksinya pada hari itu sebesar hasil penjualan *marhun*, apabila hasil penjualan lebih dari besarnya pinjaman maka akan di pulangkan kepada *rahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah memberi waktu paling lama 1 tahun untuk uang kelebihan tersebut, dan apabila dalam waktu 1 tahun tidak di ambil maka akan diserahkan ke badan amil zakat. Dan apabila hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi pinjaman *rahin* maka *rahin* diwajibkan menutupi kekurangan tersebut. Dari praktek yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru dalam hal

²¹Rifqi Muhammad, *loc. Cit* h.418

penjualan *marhun* telah sesuai dengan syariat Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan *marhun*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penjelasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penerapan *Rahn* (gadai Syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn*, akad *ijarah* untuk pembayaran sewa tempat dan perawatan *marhun*. Penentuan biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* ditentukan dari besarnya jumlah taksiran *marhun*, dan apabila *rahin* tidak mengambil penuh pinjaman maka akan diberi diskon sesuai dengan berapa persen *rahin* mengambil pinjaman tersebut, selanjutnya penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan menggunakan prinsip *ijarah*. Jangka waktu peminjaman selama 4 bulan, pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu ulang *rahn*, mencicil, membayar sebagian atau melunasi pada waktu jatuh tempo. apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak mampu untuk melunasi maka *marhun* akan dijual untuk membayar pokok pinjaman ditambah *ijarah* dan biaya penjualan, apabila hasil penjualan melebihi dari pinjaman maka menjadi milik *rahin*, akan tetapi kalau hasil penjualan lebih kecil dari pinjaman nasabah diwajibkan membayar kekurangan tersebut.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan dan Penerapan *Rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Pekanbaru.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan *Rahn* (gadai syariah) pada Perum Pegadaian Syariah HR.

Soebrantas Pekanbaru dan ditinjau menurut Ekonomi Islam maka didapatkan hasil bahwa sanyap pelaksanaan dan penerapan *Rahn* yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Syariah HR. Soebrantas telah sesuai dengan Syariat Islam. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih harus menjadi perhatian serius yaitu tentang kejujuran dan keterbukaan terhadap barang yang dapat dijadikan jaminan, sehingga tidak ada lagi image negatif masyarakat terhadap Pegadaian Syariah, selanjutnya terhadap perbedaan tarif *ijarah*, apabila takstran *marhun* mengalami kenaikan maka seharusnya pihak Pegadaian Syariah juga harus menaikkan jumlah pinjaman yang diberikan.

B. Saran

1. Kepada pihak Perum Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru, Penerapan *rahn* yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah HR. Soebrantas Pekanbaru telah sesuai dengan syariat Islam untuk itu harus dipertahankan sehingga tetap dalam prinsip yang sesuai dengan syariat

Islam. Serta terhadap barang-barang yang dapat dijamin, pihak Pegadaian seharusnya lebih menspesifikasikan di dalam brosur sehingga nasabah bisa mengetahui barang-barang apa saja yang dapat dijadikan jaminan, sehingga tidak akan menimbulkan image yang negatif terhadap Pegadaian Syariah. Yang terpenting selanjutnya terhadap pemberian tambahan pinjaman apabila taksiran terhadap *marhun* mengalami kenaikan, selanjutnya Pengetahuan pegawai terhadap Ekonomi Islam sangat perlu ditingkatkan.

2. Pihak pemerintah untuk membentuk DPS yang langsung mengawasi kegiatan operasional Pegadaian Syariah agar tidak tergantung dengan DPS Bank Muamalat, dengan demikian akan lebih mengoptimalkan pengawasan DPS terhadap operasional Pegadaian Syariah.
3. Pihak Akademik, meningkatkan kajian-kajian terhadap Pegadaian sehingga akan menghasilkan ilmu baru yang bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan oleh pihak Pegadaian Syariah, serta di harapkan dapat menghasilkan sarjana yang menguasai Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001)
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2000)
- Buchari AlmaDoni Jumi Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekanisa Edisi 2, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani, 2001)
- Mustafa Edwin Nasution dan DKK, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2003),
- Muhammad Yusuf, *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: STIS, 2000)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008)
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Instination Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008)